

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG

: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka pemerataan hasil pembangunan

: Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan

KINERJA UTAMA 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2	FORMULA/PENJELASAN 3	SUMBER DATA 4	PENANGGUNG JAWAB 5
Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Permukiman yang layak	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak	$\frac{\text{Persentase penduduk terlayani sarana air minum} + \text{Persentase penduduk terlayani} + \text{Persentase rumah layak huni}}{3}$ <p>Penjelasan : Masyarakat terlayani air minum oleh jaringan perpipaan (PDAM dan HIPPAM serta bangunan bukan jaringan perpipaan terlindungi yaitu sumur gali dan sumur pompa tangan) merupakan persentase hasil pembagian jumlah penduduk yang terlayani sarana air minum dengan jumlah penduduk di Kabupaten Malang Masyarakat terlayani air limbah adalah jumlah penduduk yang terlayani dengan septiktank/MCK komunal/sistem pengelolaan air limbah-SPAL terpusat merupakan persentase hasil pembagian jumlah penduduk yang terlayani air limbah dengan jumlah penduduk di Kabupaten Malang Jumlah rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan bagi penghuninya serta kecukupan luas ruang, merupakan persentase hasil pembagian jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah di Kabupaten Malang</p>	RISPAM, DPKPC, BPS, SSK, MPSS, RAD AMPL, PDAM, Dinkes	DPKPCK (Bidang Permukiman dan Bidang Perumahan)
Manfaat Ruang yang sesuai dengan Luas dan Kualitas/Kuantitas Bangunan yang memenuhi Standar Teknis	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah	$\frac{\text{Persentase luas wilayah yang sesuai peruntukan} + \text{Persentase jumlah bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik}}{2}$ <p>Penjelasan : Luas wilayah yang sesuai peruntukannya adalah luas izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan, merupakan persentase hasil pembagian luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan luas wilayah Rencana Tata Ruang. Jumlah bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik adalah kondisi bangunan aset Pemkab Malang yang masih layak dipergunakan, merupakan persentase hasil pembagian jumlah bangunan berkondisi baik dan representatif dengan jumlah bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Malang.</p>	DPKPCK	DPKPCK (Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan)

Kepanjen, Januari 2019
Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Malang

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661217 199303 1 006